



Pengaruh Pendapatan Asli Kabupaten/Kota, Dana Alokasi Umum, Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Provinsi Aceh

Ihsan Arief¹

¹ Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

Corresponding Author: ihsan_arief100@yahoo.com¹

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli kabupaten/kota, dana alokasi umum, dana otonomi khusus dan dana bagi hasil terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota pemekaran di provinsi Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota pemekaran di Provinsi Aceh yang berjumlah 13 Kabupaten/Kota, dengan tahun pengamatan yang diambil adalah tahun 2014-2015. Metode pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling. Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara yaitu yang diperoleh dari laporan keuangan daerah Kabupaten dan Kota Pemekaran di Aceh periode tahun 2014 dan 2016 yang bersumber dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sehingga jumlah observasi 39 observasi (13 provinsi dikali 3 tahun). Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAK berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dana Otsus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan sedangkan DAU memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan dan DBH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

KEYWORDS : *kinerja keuangan pengaruh pendapatan asli kabupaten/kota, dana alokasi umum, dana otonomi khusus dan dana bagi hasil.*

1. Pendahuluan

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota telah mendapat wewenang untuk mengatur pembangunan daerahnya sendiri. Dengan adanya pemberian otonomi daerah yang mengedepankan kemandirian daerah tersebut, maka diharapkan akan menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pendayagunaan sumber daya keuangan. Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang telah menerapkan otonomi daerah dengan landasan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Pasal 4 No. 105 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. Apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah

ditetapkan, maka tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah itu sendiri. Untuk itu, diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya yang menggambarkan sumber daya keuangan daerah tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ciri penting dari suatu daerah otonom yang mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya yaitu terletak pada strategi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemampuan di bidang keuangan daerah (Bisma dan Susanto, 2010).

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan didaerahnya melalui Pendapatan Asli Kabupaten/Kota (PAK). Tuntutan peningkatan PAK semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sedangkan pelaksanaan perimbangan keuangan dilakukan melalui dana perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Undang-undang Nomor 33 tahun 2004). Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah (Frelistiyani, 2010).

Aceh sebagai daerah provinsi merupakan ke-satuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tersebut menyatakan bahwa Propinsi Aceh akan

memperoleh DAU sebanyak 2% dari DAU nasional.

Selain itu, Propinsi Aceh juga akan memperoleh dana-dana lainnya seperti dana bagi hasil, dana Otonomi Khusus (Otsus), dan lain sebagainya. Hal ini tentunya hal akan mengakibatkan atau membawa perubahan yang begitu besar bagi daerah Kabupaten/kota yang ada di Propinsi Aceh yang tentunya ikut merasakan perubahan akibat adanya perubahan ini dengan diberlakukannya Otsus tersebut. Dalam hal ini tentunya perubahan yang sangat kentara ada pada keuangan daerah. Terdapat perubahan setelah diberlakukannya Otsus yang dapat dilihat pada beberapa rasio keuangan daerah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Dengan Otsus maka daerah memperoleh banyak tambahan dana. Diharapkan dengan dana yang banyak ini maka kesejahteraan rakyat di Propinsi Aceh dapat naik atau menjadi lebih baik dari sebelumnya, karena memang otonomi daerah dan Otsus ini diterapkan agar kesejahteraan rakyat dapat meningkat, serta kinerja dari pemerintah dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Besarnya dana yang didapat oleh Provinsi Aceh seperti halnya dua sisi mata uang yang berbeda pada koin yang sama. Di samping menguntungkan juga memberikan sebuah beban besar dalam pengalokasian dana tersebut. Pada hakekatnya pemerintah daerah adalah aktor utama dalam kemajuan daerahnya, dan menjadi fasilitator dalam menjembatani aspirasi masyarakat daerah dengan pusat. Titik inilah yang memunculkan polemik permasalahan, sudah enam tahun semenjak Undang-undang tentang pemerintah Aceh disahkan, Aceh bergerak belumlah sesuai ekspektasi. Besarnya pemasukan dana tidak melulu membawa jalan mulus untuk pembangunan. Terdapat berbagai hambatan dalam alokasi dana, yang dituntut merata dan berorientasi pada kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Pengaruh Pendapatan Asli Kabupaten/Kota, Dana Alokasi Umum, Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Provinsi Aceh”

2. Tinjauan Pustaka

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah:

1. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBA. LRA menyajikan ikhtisar sumber, aplikasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.
2. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemda
3. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi dalam Deddi dan Ayuningtyas (2011), secara umum pengukuran kinerja menunjukkan hasil dari implementasi sebuah kegiatan/kebijakan, tetapi pengukuran kinerja tidak menganalisis alasan hal ini dapat terjadi atau mengidentifikasi perubahan yang perlu dilakukan terhadap tujuan dari kegiatan/

kebijakan. Lalu masih menurut Deddi dan Ayuningtyas (2011), berikut tujuan penilaian kinerja di sektor publik:

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi.
2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai.
3. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya.
4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*).
5. Memotivasi pegawai.
6. Menciptakan akuntabilitas publik.

Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2004: 121) :

1. Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah.
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk

merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya (Halim, 2007:234). Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi belanja daerah}}{\text{Realisasi pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Pendapatan Asli Kabupaten/Kota (PAK)

PAK adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Yuwono (2008:93) menjelaskan pendapatan daerah yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (Permendagri No. 13/2006 dan Undang-undang No. 17 tahun 2003).

PAK merupakan pendapatan yang diterima langsung dari daerah sendiri. Pendapatan daerah berasal dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli kabupaten/kota serta lain-lain pendapatan yang sah. PAK merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang terdiri atas pajak daerah dan retribusi daerah, pos penerimaan non pajak berupa penerimaan hasil perusahaan milik daerah, serta pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam (Bastian, 2002).

Mahmudi (2010:16) menjelaskan sumber pendapatan daerah pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber pendapatan yang saat ini ada dan sudah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan sumber pendapatan dimasa mendatang yang masih potensial atau tersembunyi dan baru akan dipeoleh apabila sudah dilakukan upaya-upaya tertentu. PAK adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2007).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa PAK adalah semua penerimaan dari dalam daerah yang bersangkutan yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan salah satu bagian dari dana peerimbangan. Pemerintah pusat dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjelaskan DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

DAU menurut Prakosa (2004:104) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. DAU merupakan block grants yang diberikan kepada semua kabupaten/kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari Penerimaan Dalam Negeri yang ditetapkan dalam APBN. Kemudian, dari 25% tersebut dibagi lagi menjadi 90% untuk DAU bagi daerah Kabupaten/Kota dan 10% untuk DAU bagi daerah Propinsi. Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya,

DAU berperan sebagai transfer yang bersifat *block grants*.

Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Nordiawan, et all, 2007). Menurut buku dasar penyusunan APBA 2012, bagi pemerintah daerah yang mendapatkan DBH yang cukup besar, seyogyanya pemanfaatan dana tersebut dilakukan secara optimal dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan infrastruktur dasar di daerah.

DBH ini merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada dasarnya, selain dimaksudkan untuk menciptakan pemerataan pendapatan daerah, DBH juga bertujuan untuk memberikan keadilan bagi daerah atas potensi yang dimilikinya. Dalam hal ini, walaupun pendapatan atas pajak negara dan pendapatan yang berkaitan dengan SDA merupakan wewenang pemerintah pusat untuk memungutnya, namun sebagai daerah penghasil, pemerintah daerah juga berhak untuk mendapatkan bagian atas pendapatan dari potensi daerahnya tersebut.

Dana Otonomi Khusus (Otsus)

Dana Otsus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan Otsus suatu daerah, seperti yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan penyesuaian untuk beberapa daerah tertentu yang menerima DAU lebih kecil dari tahun anggaran sebelumnya, serta untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Alokasi dana Otsus

dihitung atas dasar persentase yang besarnya setara dengan 2% dari plafon DAU Nasional yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahunnya.

Mekanisme pengelolaan dana Otsus di dalam Pemerintahan Aceh diatur pula dalam Qanun Aceh No. 2 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otsus. Pada pasal 11 qanun tersebut dijelaskan bahwa sebanyak 40% (empat puluh persen) dana otsus dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Aceh, dalam hal ini adalah pemerintah provinsi. Sementara 60% (enam puluh persen) sisanya dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan di kabupaten/kota. Hal ini bermakna bahwa peran dana Otsus yang dialokasikan oleh pemerintah pusat sangat besar bagi kemajuan pembangunan di Aceh, terutama alokasi besar yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

3. Metode Penelitian

Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan. Pengukuran kinerja keuangan menggunakan rasio sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi belanja daerah}}{\text{Realisasi pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan asli kabupaten/kota (PAK), dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), dan dana otonomi khusus (Otsus).

Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota pemekaran di Provinsi Aceh yang berjumlah 13 Kabupaten/Kota, dengan tahun pengamatan yang diambil adalah tahun 2014-2016. Daerah pemekaran adalah wilayah baru yang berasal dari Kabupaten/kota induknya. Ketertarikan penulis untuk memilih

Kabupaten/Kota pemekaran di Aceh yaitu daerah yang mendapatkan Otsus sehingga evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah pemekaran harus dilakukan dengan tidak saja merefleksikan kinerja keuangan dari sisi keuangan pemerintah daerah secara mikro tetapi juga secara makro. Penulis menggunakan metode pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria dalam sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota pemekaran yang mempublikasikan laporan keuangan daerah yang sudah mengalami perubahan dan tersedia di <http://www.djpk.depkeu.go.id> untuk tahun anggaran 2014-2016.
2. Kabupaten/kota yang memiliki data PAK, DAU, dana Otsus, DBH dan kinerja keuangan.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda yang merupakan suatu prosedur yang sangat kuat dan fleksibel untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dengan banyak variabel independen (Malhotra, 1996 dalam Mangkuatmodjo, 2004:189). Rumus persamaan regresi linear berganda, yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana:

- Y = Kinerja Keuangan;
 α = Konstanta;
 b_1, b_2, b_3 = Koefisien penelitian;
 X_1 = PAK;
 X_2 = DAU;
 X_3 = Dana Otsus;
 X_4 = DBH; dan
 ε = Error term.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Uji Hipotesis

Pengujian Secara Partial

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh nyata masing-masing variabel independen terhadap variabel dependent. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi dan analisa hipotesa, yaitu tingkat signifikansi atau α yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%. Dengan dasar keputusan jika nilai sig. probabilitas $> 0,05$ maka H_a ditolak sedangkan jika nilai sig. probabilitas $< 0,05$ maka H_a diterima. Output SPSS menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Regresi Linear Berganda

		B	S.E	Wald	df	Sig.	Exp (B)
Step 1	X1	-,076	,069	1,212	1	,271	,927
	X2	1,155	,518	4,967	1	,026	3,175
	X3	,321	,213	2,276	1	,131	1,379
	X4	2,494	0,898	7,707	1	,006	12,105
	X5	-2,265	1,187	3,644	1	,046	,104
	Constant	-1,167	1,431	,665	1	,415	,311
Chi-square							
		7,246			8	,510	

Sumber: Data diolah (2018)

Berdasarkan angka-angka di atas, maka analisis atas persamaan regresi linear dapat dijelaskan dibawah ini:

$$Y = 1,166 + 0,023 \text{ PAK} - 0,023 \text{ DAU} - 0,015 \text{ Dana Otsus} - 0,030 \text{ DBH}$$

Secara sendiri-sendiri (parsial), pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat ternyata tidak seragam. Penjelasan nya adalah sebagai berikut:

- Pengaruh variabel bebas PAK terhadap variabel terikat kinerja keuangan secara statistik tidak signifikan pada level $\alpha = 5\%$. Nilai probabilitas atau *Sig.value* sebesar 0,156 (lebih besar dari 0,05 dan 0,10) dan *t-value* sebesar 0,050 dan memiliki tanda positif. Tanda positif pada koefisien PAK ini menunjukkan bahwa PAK berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, namun pengaruh ini tidak signifikan yang berarti pengaruh positif ini bisa diabaikan atau tidak bermakna.
- Pengaruh variabel bebas besarnya DAU terhadap variabel terikat kinerja keuangan secara statistik tidak signifikan, baik pada level $\alpha = 5\%$ dengan nilai probabilitas atau *Sig.value* sebesar 0,114 (lebih besar dari 0,05 dan 0,10). Nilai *t-value* sebesar 0,023 bertanda negatif menunjukkan arah DAU memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, namun pengaruh tersebut tidak signifikan atau bisa diabaikan.

- Pengaruh variabel bebas dana Otsus terhadap variabel terikat kinerja keuangan secara statistik tidak signifikan pada level $\alpha = 5\%$. Nilai probabilitas atau *Sig.value* sebesar 0,131 (lebih besar dari 0,05 dan 0,10) dan *t-value* sebesar 0,015 bertanda positif hal ini menunjukkan bahwa dana Otsus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.
- Pengaruh variabel bebas DBH terhadap variabel terikat kinerja keuangan secara statistik tidak signifikan pada level $\alpha = 5\%$. Nilai probabilitas atau *Sig.value* sebesar 0,034 (lebih kecil dari 0,05 dan 0,10) dan *t-value* sebesar 0,030 bertanda negatif hal ini menunjukkan bahwa DBH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Pengujian Secara Simultan

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh nyata secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi dan analisa hipotesa, yaitu tingkat signifikansi atau α yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%. Dengan dasar keputusan jika nilai sig. probabilitas $> 0,50$ maka H_a ditolak sedangkan jika nilai sig. probabilitas $< 0,05$ maka H_a diterima. Output SPSS menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji F

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.028	4	.007	5.449	.002 ^b
	Residual	.043	34	.001		
	Total	.071	38			

Tabel 4.11 diatas memperlihatkan hasil pengujian simultan, dimana secara bersama-sama semua variabel bebas yakni PAK, DAU, dana Otsus dan DBH memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Secara

statistik, pengaruh tersebut signifikan pada level $\alpha=5\%$. Hal ini didasarkan pada besaran angka *Sig.value* sebesar 0,002 yang lebih besar dari 0,050.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh PAK, DAU, dana Otsus dan DBH terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota pemekaran di Provinsi Aceh. Ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini, yaitu:

1. PAK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pada tingkat toleransi sebesar lima persen atau $\alpha = 5\%$ maupun 10%. Hal ini membuktikan ketergantungan pemerintah daerah kabupaten/kota pemekaran di Aceh kepada pemerintah pusat masih cukup tinggi.
2. DAU memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pada tingkat toleransi sebesar lima persen atau $\alpha = 5\%$ maupun 10%. Semakin tinggi besaran DAU yang diterima dari pusat maka semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Dana Otsus memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pada tingkat toleransi sebesar lima persen atau $\alpha = 5\%$ maupun 10%, hal ini disebabkan adanya hambatan atas pengelolaan dana otonomi daerah oleh kabupaten/kota pemekaran di Aceh.
4. DBH memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada tingkat toleransi sebesar lima persen atau $\alpha = 5\%$. Artinya bahwa, semakin besar pendanaan DBH yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah.

Saran

Beberapa saran untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Mengambil dari hasil penelitian yang membuktikan tidak pengaruhnya PAK, DAU, dana Otsus dan DBH terhadap kinerja keuangan, maka dibutuhkan upaya dari pemerintah daerah kabupaten/kota pemekaran

di Aceh untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, salah satu caranya yaitu memperbaiki kinerja manajemen daerah dan tupoksi setiap organisasi yang bergerak untuk pemekaran daerah benar-benar berjalan sesuai dengan yang diharapkan pada Undang-Undang No. 22/1999.

2. Penggunaan variabel penelitian alternatif. Misalnya untuk variabel kinerja keuangan, yang dalam penelitian ini menggunakan rasio kemandirian daerah. Studi berikutnya dapat menggunakan rasio efisiensi dan rasio efektifitas daerah.

Daftar Pustaka

- Abdullah, dan Febriansyah. (2016). Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan periode 2011-2013. *Jurnal Universitas Bengkulu*.
- Adhiantoko, Hony. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora. Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Afriansyah, Fadhil. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi yang Menerima Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (Studi Pada Provinsi Aceh dan Papua Barat Tahun 2012-2014). Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala.
- Al-Latief, M, Abduh, (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dan Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera Bagian Utara. Skripsi. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
- Andirfa, Mulia. (2016). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi* (pp.30-38), Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.

- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedir Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cetakan ke lima belas. Jakarta: Rineka Cipta.
- Batubara, Dian Nofrina. (2009). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara*. Skripsi Tidak Dipublikasi. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Bisma, I Dewa Gde, dan Hery Susanto. (2010). *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 - 2007*, Jurnal (Vol. 4, No. 3), Ganec Swara Edisi Khusus.
- Bratakusumah, Deddy, Supriady, dan Dadang Solihin. (2001). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Darumurti, Krishna D dan Umbu Rauta, (2003). *Otonomi Daerah: Perkembangan Pemikiran Pengaturan dan Pelaksanaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari, (2007). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Jurnal Akuntansi. Makassar: Simposium Nasional Akuntansi X.
- Florida, A., 2007. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara*. Tesis Akuntansi. Medan: Fakultas Ekonomi Sumatera Utara.
- Frelistiyani, Winda. (2010). *Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BPUNDIP.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi*. Jakarta Salemba: Empat.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah, Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ibnu Syamsi. (2004). *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Julitawati, E., Darwanis, dan Jalaludin, (2012). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh*. Jurnal Akuntansi (Volume I, No.I, Agustus 2012). Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Khairani, Reni. (2014). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2012*. Skripsi, Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
- Mangkuatmodjo, Soegyarto. (2004). *Statistik Lanjutan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah: Buku Seri Membudayakan Akuntabilitas Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Muhayanah, Fisa Aprilia. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2013*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Nazarullah, (2011). *Pengaruh Dana Bagi Hasil Migas dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Utara*. Skripsi. Aceh Utara.
- Nordiwana, Deddi., Iswahyudi Sondi Putra dan Maulidah Rahmawati, (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurcholis, Hanif. (2005). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Pemerintah Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia.
- _____, Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Indonesia.
- _____, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Rukmana, Wan Vidi. (2013). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau*. Jurnal

- Universitas Maritim Raja Ali Haji (hal. 1-15).
- Shintia, Naomi, Lumban, Tobing, Tessa. (2016). Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. Skripsi Program Studi Akuntansi, Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.
- Sidik, Machfud. (2002). Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Mengacu pada Pencapaian Tujuan Nasional. Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Jakarta. 17-18 April 2002.
- Sijabat, dkk. (2014). Analisis Kinerja Keuangan serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, (Vol.2, No.2, Hal.236-242). Universitas Brawijaya.
- Sumarjo, Hendro. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jakarta: Skripsi Universitas Sebelas Maret.
- Suprianto. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo. *Jurnal Universitas Negeri Gorontalo*.
- Wahyuni dan Adi, Hari Pryo. (2009). Analysis Pertumbuhan Dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah. *Jurnal*. Surabaya: Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Wenny, Dhia Cerrya. (2012). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatra Selatan. *Jurnal Ilmiah (Vol.2, No.I)*. STIE MDP.
- Widjaja, H.A.W. (2008). Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yuwono, Sony, Dwi Cahyo Utomo, H. Suheiry Zein, dan H. Azrafiany A.R. (2008). Memahami APBD dan Permasalahannya Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah. Malang: Penerbit Bayumedia Publishing.
-